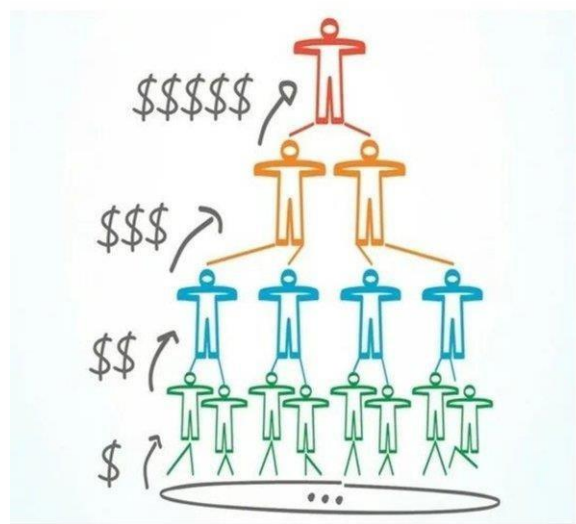


PONZI SCHEME



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL SKEMA PONZI

NAMA : ADRI FASYA SAPUTRA

NIM 1810611238



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL SKEMA
PONZI**

SKRIPSI

ADRI FASYA SAPUTRA

1810611238

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

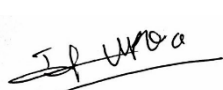

**JUDUL :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL TIKTOK CASH**

ADRI FASYA SAPUTRA

1810611238

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, Januari 2023

Mengetahui	Menyetujui
Ketua Program Studi S1 Hukum	Dosen Pembimbing Tugas Akhir
	
<u>Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.</u>	Siti Nurul Intan Sari, D. S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031	NIP.486011310301

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini sepenuhnya karya saya, dan saya telah mengutip semua sumber yang digunakan dengan benar. Jika ternyata tugas akhir ini ditulis dengan materi yang dijiplak, saya tidak masalah menghadapi konsekuensi hukum.

Nama : Adri Fasya Saputra

NIM : 1810611238

Tanggal : 27 Januari 2023

Tanda Tangan :



Adri Fasya Saputra

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adri Fasya Saputra

NIM : 1810611238

Fakultas : Hukum

Program Studi : SI Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Skema Ponzi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Januari 2023

Yang menyatakan,



Adri Fasya Saputra



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS
HUKUM**

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh

Nama : Adri Fasya Saputra

NIM : 1810611238

Program Studi : Hukum S.1

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI
ILEGAL SKEMA PONZI**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.

Ketua

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Anggota 1

Siti Nurul Intan Sari D., S.H., M.Kn

Anggota 2

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

ABSTRAK

Teknologi melalui jaringan media sangat berkembang, sehingga dalam kesehariannya masyarakat tidak dapat lepas dari internet, termasuk perekonomian. Perkembangan teknologi dalam hal investasi dapat dilakukan tanpa perlu datang ke perusahaan investasi, melainkan hanya mengunduh aplikasi dan mendaftarnya secara daring. Selain kemudahan dalam mendaftar, masyarakat juga disuguhi berbagai macam produk investasi dan dapat berinvestasi sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut dapat menjadi masalah apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam memilih produk yang ingin diinvestasikan dan kemungkinan terburuk adalah menjadi korban investasi illegal atau bodong. Investasi illegal dapat dijumpai pada skema ponzi untuk menarik korbannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi illegal skema ponzi? (2) Bagaimana peran pemerintah terhadap korban investasi illegal yang telah beroperasi menghimpun dana tanpa izin di masyarakat?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perusahaan investasi memiliki izin yang sah untuk menghimpun dana masyarakat, maka perusahaan tersebut akan diberikan perlindungan hukum oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat direalisasikan oleh pemerintah apabila perusahaan investasi telah mendapatkan izin usaha untuk menghimpun dana masyarakat. Jika perusahaan investasi tersebut memiliki izin yang legal, maka korban mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan didukung Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan melakukan penanganan dengan bantuan Kominfo untuk memblokir konten investasi illegal dengan skema ponzi, namun, kompensasi bagi korban investasi illegal tidak bisa didapatkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Investasi illegal*

ABSTRACT

Technology through media networks is very developed, so that in their daily lives people cannot be separated from the internet, including the economy. Technological developments in terms of investment can be made without the need to come to an investment company, but only download an application and register online. In addition to the convenience of registering, the public is also offered a variety of investment products and can invest according to their wishes. This can become a problem if people are not careful in choosing the product they want to invest in and the worst possibility is becoming a victim of illegal or fraudulent investment. Illegal investments can be found in ponzi schemes to attract victims. The formulation of the problems in this study are: (1) What is the form of legal protection for victims of illegal Ponzi scheme investments? (2) What is the role of the government towards victims of illegal investments who have been operating in collecting funds without permission in the community? This research is normative legal research, with a statute approach and a case approach. This research shows that if an investment company has a valid permit to collect public funds, then the company will be given legal protection by the state. The results of the study show that legal protection can be realized by the government if the investment company has obtained a business license to collect public funds. If the investment company has a legal permit, the victim will receive legal protection based on Article 30 paragraph 1 letter b Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan and supported by Article 4 letter a Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. The role of the government through Otoritas Jasa Keuangan is to handle it with the help of Kominfo to block illegal investment content with ponzi schemes, however, compensation for victims of illegal investments cannot be obtained.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Illegal Investment*

KATA PENGANTAR

Dan saya berterima kasih dan memuji Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan bantuan-Nya. Skripsi saya berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Skema Ponzi”. Dalam rangka menyelesaikan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya mengajukan skripsi sebagai berikut. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak waktu dan pikiran yang digunakan untuk menulis skripsi ini. Namun saya tidak dapat melakukannya tanpa cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan dari keluarga dan teman-teman saya. Saya berterima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Abdul Halim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Siti Nurul Intan Sari. D., S.H., M.Kn. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada mahasiswa selama kuliah, dan seluruh pegawai Fakultas Hukum, yang telah dengan tekun dan sabar melayani seluruh administrasi selama proses penelitian ini berlangsung.
5. Orang tua penulis, yang mendoakannya secara teratur dan menginspirasinya untuk terus bekerja keras dalam studinya.
6. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya dalam mengejar ilmu ini.
7. Teman-teman terdekat penulis, yang telah memberikan dorongan dan inspirasi terus-menerus selama penelitian ini berlangsung.
8. Semua orang yang telah berkontribusi tetapi tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan pahala kepada semua pihak yang telah membantu saya, dan saya akui bahwa tesis saya ini belum sempurna karena kurangnya

pengalaman dan keahlian saya. Oleh karena itu, saya mohon dengan tulus kritik dan ide yang membangun dari semua pihak dalam mengembangkan laporan penelitian ini.

Adri Fasya Saputra



1810611238

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK..v	
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	17
3. Tinjauan Umum Investasi.....	19
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	26
A. Perusahaan Investasi TikTok Cash yang Tidak Mmiliki Izin Usaha dan Menimbulkan Kerugian bagi Masyarakat.....	26
1. Masalah Perizinan TikTok Cash.....	26

2. Cara TikTok Cash Menghimpun Dana dari Masyarakat.....	27
3. Kerugian Investor (Pengguna) TikTok Cash.....	28
B. Kasus Serupa dengan TikTok Cash.....	29
1. Kasus Investasi Ilegal Vtube.....	29
2. Kasus Binary Option.....	31
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL	
TIKTOK CASH.....	33
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi illegal TikTok Cash.....	33
B. Peran Pemerintah Terhadap Perusahaan Investasi Ilegal yang Beroperasi Menghimpun Dana Tanpa Izin.....	36
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	39
2. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka.....	xi